

**PERAN DAN FUNGSI UN WOMEN DALAM MEMPERJUANGKAN
PEREMPUAN DI YAMAN MELALUI AGENDA WOMEN, PEACE,
AND SECURITY (WPS) TAHUN 2014-2017**

SKRIPSI



Oleh:

NADIA FATIN HAKIM

18323015

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024/2025

**PERAN DAN FUNGSI UN WOMEN DALAM MEMPERJUANGKAN
PEREMPUAN DI YAMAN MELALUI AGENDA WOMEN, PEACE,
AND SECURITY (WPS) TAHUN 2014-2017**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NADIA FATIN HAKIM

18323015

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024/2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Peran dan Fungsi Un Women dalam Memperjuangkan Perempuan di Yaman Melalui Agenda Women, Peace, and Security (WPS) Tahun 2014-2017

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

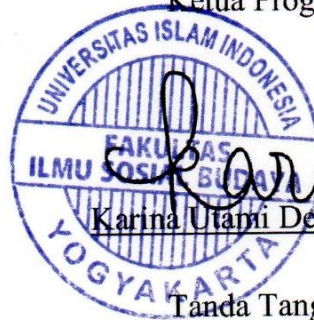
Pada Tanggal
15 Agustus 2025



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Dewan Penguji

1. Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

2. Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025



NADIA FATIN HAKIM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, kupersembahkan karya sederhana ini kepada pilar sejati hidupku, Ayahanda Azam Fatoni dan Ibunda Tri Setyowati yang telah memberikan kasih sayang melalui dukungan, restu, doa yang tulus, pengorbanan, dan segala hal yang telah diperjuangkan untuk memberikan yang terbaik kepadaku dalam proses yang tidak mudah ini. Selebar kertas persembahan ini tidak akan bisa membalas segala pengorbanan dan jerih payah Papah dan Ibu, namun semoga ini menjadi langkah awal untuk membawa kebanggaan dan kebahagiaan di hati kalian yang selalu penuh harap. Terimakasih telah membuktikan bahwa cinta dan dukungan kalian adalah fondasi dari setiap langkahku. Terimakasih karena selalu mengajarkan tentang ketabahan, mengingatkan rasa syukur, dan selalu meridhoi dalam melakukan hal baik lainnya. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kaki ini dalam mewujudkan keinginan Papah dan Ibu agar dapat membalas semua perjuangan Papah dan Ibu.

Sebagai tanda cinta dan harapan, karya sederhana kupersembahkan kepada adikku tersayang, Andromeda Nusantara yang selalu membuatku termotivasi untuk tetap berjuang dengan hati yang penuh semangat. Karya ini bukan hanya sebagai perjalanan akademik, namun sebagai cerminan mimpi yang kita rajut bersama dalam tawa dan dukungan yang tulus. Semoga karya ini dapat memberikan keberanian dan keyakinan dalam menginspirasiimu untuk mewujudkan mimpi yang tidak pernah pudar. *Trust me, we'll be a fine line, we'll be alright.*

Sebagai wujud kecil dari rasa syukurku atas persahabatan yang nyata dalam setiap hadir dan setia, membuat langkah berat terasa ringan. Kepada sahabat, dan teman-teman, kupersembahkan rasa terimakasih ini karena telah menjadi tawa di tengah lelah, tenang di tengah resah, dan menjadi alasan bisa bertahan sejauh ini, dan selalu setia di setiap persimpangan, bukan untuk menunjukkan arah, namun memastikan aku tidak berjalan sendirian.

Sebagai tanda syukur, karya ini kupersembahkan untuk diriku sendiri yang tetap memilih berdiri tegak hingga akhirnya tiba di titik ini. Terkadang dunia terasa terlalu berat, namun pada akhirnya memilih untuk terus percaya bahwa akhirnya kita sampai. Terimakasih karena telah berusaha menyembuhkan dan menguatkan sosok Nadia kecil yang sedang berproses ini. Karya ini akan selalu menjadi pengingat bahwa setiap luka, air mata, dan lelah ternyata tetap bisa membawa sampai sejauh ini. Terimakasih karena tidak pernah sungguh-sungguh meninggalkan diri ini. *I'm proud of you.*

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terdapatnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah ayat 5-6)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu”

-Umar bin Khattab

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapter of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go.”

-Taylor Swift

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	12
1.7 Argumen Sementara.....	17
1.8 Metode Penelitian	17
1.8.1 Jenis Penelitian.....	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	18
1.8.4 Proses Penelitian	18
1.9 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB 2 PERAN UN WOMEN SEBAGAI AKTOR MELALUI AGENDA WOMEN PEACE, AND SECURITY (WPS) DALAM MEMPERJUANGKAN PEREMPUAN DI YAMAN.....	20
2.1 Organisasi Internasional sebagai Aktor menurut Clive Archer	20
2.2 Profil UN Women	21
2.3 UN Women sebagai Aktor dalam Memperjuangkan Perempuan Yaman	22
2.4 Kerangka Women, Peace, and Security (WPS).....	28

2.5 Analisis Fungsi UN Women dalam Memperjuangkan Perempuan di Yaman	30
BAB 3 FUNGSI ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PENERAPAN FUNGSI NYA OLEH UN WOMEN MELALUI AGENDA WOMEN, PEACE, AND SECURITY DI YAMAN	33
3.1 UN Women melalui Agenda WPS sebagai Fungsi Sosialisasi.....	33
3.2 UN Women melalui Agenda WPS sebagai Fungsi Pelaksanaan.....	36
3.3 UN Women melalui Agenda WPS sebagai Fungsi Penyediaan Informasi	42
BAB 4 KESIMPULAN	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Rekomendasi.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang terjadi di Yaman memperburuk ketidaksetaraan gender, Kekerasan Berbasis Gender (KBG), dan marginalisasi perempuan. Penelitian ini menganalisis peran dan fungsi UN Women dalam memperjuangkan perempuan di Yaman melalui agenda Women, Peace, and Security (WPS) pada periode 2014-2017. Peneliti menggunakan kerangka teori Clive Archer melalui bukunya yang berjudul *International Organization* tentang peran organisasi internasional sebagai aktor, serta fungsinya sebagai sosialisasi, pelaksanaan, dan penyediaan informasi. Melalui agenda WPS, UN Women membentuk Yemeni Women's Pact for Peace and Security yang mendorong partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, memberikan perlindungan dari kekerasan, dan memberdayakan secara ekonomi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data sekunder berupa literatur, jurnal, dan laporan resmi menunjukkan bahwa UN Women berhasil mensosialisasikan norma kesetaraan gender, melaksanakan program Cash for Work dan menyediakan safe shelters meskipun banyak hal yang membatasi efektivitasnya seperti adanya tantangan patriarki budayam fragmentasi politik, dan keterbatasan dana. Namun dengan demikian, UN Women dapat melakukan kontribusi dalam membangun perdamaian inklusif bagi perempuan di Yaman.

Kata-kata kunci: *UN Women, Women, Peace, and Security (WPS), kesetaraan gender, perempuan Yaman.*

ABSTRACT

The armed conflict in Yemen has exacerbated gender inequality, Gender Based Violence (GBV), and the marginalization of women. This study analyses the role and functions of UN Women in advocating for women in Yemen through the Women, Peace, and Security (WPS) agenda during the 2014-2017 period. Utilizing Clive Archer's theoretical framework from his book International Organization, which outlines the role of international organizations as actors and their functions in socialization, implementation, and information provision, the research highlights UN Women's efforts. Through the WPS agenda, UN Women established the Yemeni Women's Pact for Peace and Security, promoting women's participation in peace processes, providing protection from violence, and fostering economic empowerment. Employing a qualitative research method with secondary data collection from literature, journals, and official reports, the findings show that UN Women successfully socialized gender equality norms, implemented programs such as Cash for Work, and provided safe shelters, despite challenges such as cultural patriarchy, political fragmentation, and funding limitations. Nevertheless, UN Women has contributed to building inclusive peace for women in Yemen.

Keywords: *UN Women, Women, Peace, and Security (WPS), gender equality, Yemeni Women.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yaman merupakan negara yang terletak di ujung selatan Semenanjung Arab, berbatasan langsung dengan Arab Saudi di utara dan Oman di timur. Yaman termasuk dalam kategori negara berkembang dengan tingkat pendapatan rendah dan ketergantungan tinggi terhadap bantuan internasional. Pada tahun 2012, Presiden Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatannya dikarenakan adanya protes dari masyarakat secara besar-besaran yang menentang pemerintahannya. Kemudian digantikan dengan presiden Abdrabbuh Mansur Hadi. Presiden Abdrabuh Mansur Hadi mengusung untuk dibentuknya komisi penyelidikan independen guna menyelidiki adanya pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahan Saleh. Namun hingga tahun 2014, Hadi belum memberikan pencapaian kemajuan, sehingga pemerintahan Hadi dianggap lemah dalam hal menangani stabilitas politik. Pada tahun yang sama, kelompok Houthi memasuki Sana'a untuk merebut markas besar di pemerintahan sembari memanfaatkan kekacauan politik dan juga mencari suara rakyat. Kelompok Houthi merebut Sana'a dan membentuk Komite Revolusi, serta menguasai wilayah lainnya termasuk pelabuhan Hodeida. Ketegangan antar kelompok politik, sektarian, dan regional terus berlanjut hingga akhirnya konflik bersenjata terjadi di tahun 2015 setelah ditandai oleh Houthi yang mengambil alih Sana'a di tahun 2014. (Human Rights Watch n.d.)

Sebelum terjadinya konflik, Yaman sudah menghadapi kebutuhan yang sangat besar akibat kemiskinan selama bertahun-tahun, menjadi negara yang terbelakang, banyaknya pembangunan, kerusakan lingkungan, dan konflik yang terus menerus, namun penegakan hukumnya sangat lemah. Sejak meletusnya konflik, kondisi sosial dan ekonomi di Yaman mengalami kemunduran drastis yang secara signifikan memperparah posisi dan peran perempuan dalam masyarakat. Kerentanan kronis yang menimpa Yaman menyebabkan sekitar 18,8 juta orang membutuhkan aksi perlindungan dari berbagai pihak yang mengalami peningkatan hampir 20% sejak akhir 2014. Pada tahun 2013 dan di tahun-tahun sebelumnya, perekonomian di Yaman sudah hancur secara sengaja akibat kerusakan infrastruktur hingga mencapai kerugian sebesar 300 miliar rupiah yang setara dengan setengah dari GDP pada tahun tersebut. Penembakan serta serangan lainnya sudah menghancurkan jalan, pabrik, pelabuhan, pasar, dan juga pabrik, sehingga pada bulan Desember 2016 menjadi naik sebesar 22% dari rata-rata harga di tahun-tahun sebelumnya akibat terbatasnya distribusi produk yang disebabkan kerusakan tersebut. (OCHA 2017)

Konflik tersebut mengakibatkan krisis kemanusiaan yang digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu yang paling buruk di dunia. Segala infrastruktur dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi mengalami kehancuran besar-besaran. Yaman menjadi negara yang mengalami krisis paling kompleks dan saling berkaitan di dunia. Yaman sangat menjunjung tinggi sistem patriarki, dimana posisi laki-laki lebih dominan daripada posisi perempuan. Sistem patriarki inilah yang memperburuk ketimpangan struktural yang sudah lama ada. Yaman menempati peringkat bawah dalam hal partisipasi ekonomi dan politik

perempuan di tahun 2014, dan tetap stagnan berada di peringkat bawah hingga tahun-tahun berikutnya. Dengan sistem sosial patriarkal yang sudah lama mengakar, ketimpangan gender di Yaman semakin diperparah dengan adanya konflik, lemahnya institusi negara dalam melindungi hak-hak perempuan, dan juga hukum yang diskriminatif. Kesetaraan gender masih terus diperjuangkan oleh banyaknya perempuan di Negara-negara Arab, khususnya Yaman.

Konflik bersenjata juga ikut memperdalam marginalisasi perempuan. Dari banyaknya kasus, perempuan di Yaman menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG). KBG meningkat secara signifikan, dengan laporan meningkat sebesar 36% antara 2016-2017. Dalam konteks hukum dan sosial, perempuan kerap menghadapi pembatasan mobilitas, seperti keharusan didampingi oleh mahram untuk berpergian, yang berdampak langsung pada akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar lainnya. Selain itu, data menunjukkan bahwa pernikahan anak meningkat tajam, dari 32% sebelum konflik menjadi sekitar 66% pada 2016. Sebanyak 52% gadis menikah sebelum menginjak 18 tahun, dan 14% sebelum 15 tahun. Pernikahan dini di Yaman terdengar normal, karena mereka tidak dianggap akan bekerja, setelah mereka sudah haid, mereka akan langsung dipaksa untuk menikah, padahal umurnya masih 14 tahun, mereka dianggap “sapi perah” yang hanya bisa hamil, menyusui, dan melahirkan, tidak untuk belajar, bekerja, dan tidak ada hak untuk memilih. (UNICEF Yemen Country Office, & Yemen Ministry of Education 2016)

Konflik bersenjata di Yaman juga turut memperparah akses lainnya, yaitu di bidang pendidikan perempuan. Menurut data yang berasal dari sumber primer

organisasi internasional, INEE (Inter-Agency Network for Education in Emergencies) menampilkan pada tahun 2019 bahwa tingkat pendaftaran sekolah dasar bagi perempuan turun dari 77,15% pada tahun 2015, dan menjadi 73,97% pada tahun 2016. (Inter-Agency Network for Education in Emergencies 2019).

Selain itu, pada bidang pekerjaan pun perempuan tidak mendapat akses kerja seluas laki-laki. Kesenjangan ini dikarenakan perempuan lebih sensitif dan peka terhadap pembatasan akses sosial dan pengungsian. sehingga partisipasi kerja perempuan di tahun 2014-2017 rata-rata hanya 6,1% sementara laki-laki di tahun yang sama rata-rata 70,5%. Sehingga tingkat kesenjangannya sebesar 64,4%. Kesenjangan ini tentunya dapat menimbulkan diskriminasi yang signifikan. Pada tahun 2010, partisipasi perempuan dalam ekonomi tergolong rendah namun tetap stabil, namun pasca konflik lapangan pekerjaan formal ikut hancur, sehingga sebanyak 95% perempuan terjun ke bidang pertanian tanpa upah. (Sana'a Center for Strategic Studies 2019).

Dalam konteks sosial budaya, nilai-nilai patriarkal telah mengakar kuat di masyarakat Yaman. Sebelum terjadinya konflik, di tahun 2013 presentase perempuan sebagai kepala rumah tangga adalah sebesar 9% dan meningkat menjadi 18% di tahun 2017. Konflik bersenjata tentunya telah membuat lonjakan jumlah perempuan yang berakhir menjadi kepala rumah tangga dikarenakan mereka kehilangan pria di anggota keluarganya akibat konflik tersebut. (Sana'a Center for Strategic Studies 2019)

Rendahnya partisipasi ini tidak dapat dilepaskan dari struktur hukum dan kebijakan diskriminatif yang masih berlaku. Memasuki dekade pertama abad ke-

21, lebih dari 95% negara di dunia telah mengakui dua hak demokratis utama hak warga untuk memberikan suara dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Namun, Yaman masih termasuk dalam kelompok negara yang belum sepenuhnya mengakui dan menerapkan kedua hak tersebut. Hak pilih bagi perempuan tetap dibatasi, karena pada praktiknya, hanya laki-laki yang secara umum diberikan akses penuh terhadap hak politik tersebut.

Peran perempuan dalam sistem politik masih sangat terbatas, mengingat dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan perempuan cenderung diposisikan dalam peran domestik. Partisipasi parlemen perempuan mengalami penurunan, pada tahun 2014 sebesar 0.7% turun menjadi 0,3% pada tahun 2015. (World Bank 2016). Padahal, banyak negara telah menerapkan prinsip kesetaraan gender, di mana perempuan turut aktif berpartisipasi dalam dunia politik, bahkan menduduki jabatan strategis seperti kepala negara. Di era kontemporer, semestinya perempuan memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam struktur politik, sebab perspektif perempuan juga penting untuk dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan, bukan hanya didasarkan pada sudut pandang laki-laki semata. Berdasarkan data yang ditampilkan oleh World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2017, memperlihatkan perubahan di 144 negara tentang partisipasi politiknya, urutan pertama ada Islandia sementara Yaman ada di urutan paling bawah, faktornya dari faktor ekonomi, kesehatan, pendidikan. Situasi yang menimpa terhadap perempuan di Yaman sangat memprihatinkan, dan tentunya itu membuat semakin bertambahnya konflik, dikarenakan konflik yang ada di sana menambah lapisan ketidaksetaraan gender. Hingga pada 2017, peringkat Yaman masih berada di peringkat terbawah, yaitu

urutan 144 dari 144 negara dalam permasalahan kesenjangan gender dengan skor indeks sebesar 0.516. Yaman menutup 51.6% kesenjangan gender yang membuat Yaman mengalami skor sangat rendah, terutama pada bidang pemberdayaan politik sebesar 0.014, dan partisipasi ekonomi sebesar 0.345. (World Economic Forum 2017)

UN Women merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki program dan juga melakukan aksi untuk memperjuangkan hak-hak wanita, dan juga kesetaraan gender, serta memberikan pemberdayaan terhadap perempuan. Organisasi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan kontribusi dalam menjunjung tinggi kesetaraan gender. UN Women, sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki mandat untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, memainkan peranan strategis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Yaman. Di Yaman sendiri, UN Women berusaha untuk mengatasi masalah tersebut, dengan melakukan beberapa proyek dan mendorong para wanita serta memberikan dukungan dan membela hak wanita untuk bekerja. UN Women tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan kemanusiaan, namun juga mengemban peran organisasi internasional sebagai aktor yang membentuk, menyebarkan, dan menanamkan nilai serta norma baru dalam sistem internasional. UN Women bekerja sama dengan UNDP, UNFPA, World Food Programme, dan mitra lokal seperti Yemeni Women's Union untuk memberdayakan perempuan dan memperbaiki situasi mereka.

Sebagai entitas PBB yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, UN Women dalam memperjuangkan perempuan di Yaman

mengambil bagian penting dalam mengarusutamakan agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) sejak tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Resolusi Dewan keamanan PBB 1325 dan resolusi-resolusi turunannya. Agenda ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam situasi konflik serta partisipasi aktif mereka dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan pascakonflik. UN Women juga mengajak masyarakat lokal untuk bekerja sama dalam menangani masalah tersebut. Peran UN Women di Yaman sendiri juga untuk menyebarluaskan dan menyerukan program untuk mendukung pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan mendidik anak-anak perempuan disana.

UN Women secara aktif mengembangkan berbagai program di Yaman sejak 2014 yang berfokus pada perlindungan, pemberdayaan, dan inklusi perempuan dalam proses pembangunan dan perdamaian. Salah satu inisiatif utama adalah pembentukan *Yemeni Women's Pact for Peace and Security*, sebuah wadah konsultatif yang menghimpun lebih dari 60 pemimpin perempuan dari berbagai latar belakang untuk memperjuangkan inklusi perempuan dalam proses perdamaian nasional (UN Women 2018b).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah tertera pada latar belakang, ternyata permasalahan gender dan tidak adilnya suatu pemerintahan terhadap perempuan masih saja terjadi di berbagai macam negara, terutama di Yaman. Maka dari itu, penulis menetapkan rumusan masalah adalah Bagaimana peran dan fungsi UN Women dalam memperjuangkan perempuan di Yaman melalui agenda Women, Peace, and Security (WPS) Tahun 2014-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan juga mengidentifikasi bagaimana peran dan fungsi UN Women dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui program-program UN Women di Yaman melalui pembentukan Women, Peace, and Security. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis situasi ketimpangan gender di Yaman, serta dampak konflik terhadap posisi ekonomi, sosial, dan politik perempuan. Melalui penelitian ini, ingin menganalisis bagaimana UN Women mengimplementasikan peran dan fungsi di Yaman, serta menilai efektivitas UN Women menjalankan perannya sebagai organisasi internasional, dan juga menggali kontribusi UN Women membentuk norma-norma internasional baru tentang kesetaraan gender dalam konteks negara konflik, dan apa saja tantangan serta keterbatasan yang dihadapi dalam penerapannya di Yaman pada tahun 2014-2017.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, cakupan masalah yang diteliti adalah negara Yaman karena penulis ingin berfokus pada dampak pascakonflik yang kuat dan relevan terhadap perempuan, dan melihat peran UN Women melalui agenda WPS. Yaman adalah negara yang tepat karena memiliki krisis kemanusiaan terparah pada 2014-2017, sebanyak 80% atau sekitar 22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Mirisnya, 70% dari pengungsi tersebut adalah perempuan dan anak perempuan. Penulis membatasi pembahasan yang dimulai sejak 2014 karena pada tahun 2014 hingga 2015, Yaman mengalami puncak kenaikan konflik bersenjata yang luar biasa. Diawali dengan Sana'a yang diambil kekuasaannya oleh Houthi pada 2014, yang akhirnya memperparah akses lainnya, seperti pada aspek hukum

dan kebijakan sehingga Yaman mengalami kehancuran infrastruktur massal yang mengakibatkan kekerasan berbasis gender meningkat dari yang sebelum 2014 presentasinya menunjukkan 20-30% lebih rendah, dan meningkat hingga 36% di tahun 2016 hingga 2017. UN Women memerankan fungsinya dalam permasalahan ini melalui agenda WPS dan pembentukan Yemeni Women's Pact for Peace and Security, UN Women dapat menunjukkan peran dan fungsi yang transformatif bagi perempuan di Yaman di tengah krisis, inilah yang menjadikan periode 2014 hingga 2017 menjadi relevan. (OCHA 2017)

1.5 Tinjauan Pustaka

Tulisan yang berjudul "*Mediating Transition in Yemen: Achievements and Lessons*" yang ditulis oleh Steven A. Zyck menjelaskan tentang kondisi Yaman yang dimana satu- satunya negara yang pemberontakannya berakhir dengan kesepakatan yang dinegosiasikan dan terstruktur, dan PBB membantu mengembangkan proses yang sangat kompleks, termasuk diskriminasi berpolitik di Yaman, maka dari itu UN Women turun tangan untuk menawarkan bantuan kepada para perempuan di sana. Pada awalnya UN Women sudah mantap untuk membantu walaupun mereka sempat kekurangan berbagai kebutuhan yang mana itu sangat diperlukan namun tim PBB yang sudah diperluas ini sangat bermanfaat dalam membantu kesulitan ini, mereka menyempurnakannya dengan dibantu oleh delegasi dan kelompok masyarakat di Yaman, dan siapa saja yang bisa membantu agar tujuan yang diinginkan bisa terwujud dengan baik dan selaras (Zyck 2012).

Sedangkan dalam tulisan yang berjudul "*Supporting Female Scientists in Yemen*" yang ditulis oleh Fathiah Zakhm dan diterbitkan oleh www.thelancet.com

vol 393 yang menjelaskan tentang kontribusi wanita di Yaman untuk membangun sejarah baru agar kondisi menyedihkan saat ini yang dialami Yaman tentang kondisinya yang menjadi peringkat terendah tentang kesenjangan gender, baik dibidang politik maupun pendidikan, dan belum mencapai perkembangan yang baik, akan menjadi semakin baik karena menurut penulis, wanita Yaman merupakan wanita yang paling tangguh di dunia, apalagi kebanyakan dari mereka berkomitmen serta berdedikasi tinggi terhadap sains dan pendidikan meskipun mereka mengalami kesulitan di kehidupan sehari-harinya tanpa gaji serta dalam situasi permasalahan dan konflik yang berbahaya bagi mereka. Oleh karena itu, harus ada peran dari organisasi atau komunitas internasional untuk membantu para wanita di Yaman untuk bekerja dan bergabung untuk membangun negara yang lebih baik (Zakham 2017).

Dalam buku yang ditulis oleh hasil penelitian dari Lulusan Institute of International and Development dengan judul *“Inclusive Peace and Transition Initiative: Making Women Count-Not Just Counting Women:Assessing Women’s Inclusion and Influence on Peace Negotiations”* mereka berpendapat bahwa UN Women bekerja untuk seluruh perempuan sebagai kelompok yang harus dilindungi, bukan sebagai sebuah objek yang dimana di Yaman sendiri hanya untuk bekerja di rumah, bahkan delegasi perempuan di sana memiliki masalah yaitu tantangan lingkungan sosial dan politik yang tidak mendukung para perempuan untuk berpartisipasi, dan UN Women mengatasinya dengan memberi dukungan kuat dari berbagai macam cara (Paffenholz 2016).

Tulisan yang berjudul “*The Destruction of Yemen and Its Cultural Heritage*” yang ditulis oleh Lamy Khalidi menjelaskan tentang keterpurukan Yaman bertahun-tahun lamanya khususnya tentang terampasnya hak wanita untuk terjun ke dunia politik, karena menurut sejarahnya, warisan mereka, adat istiadat, dan tradisi di Yaman memang pada dasarnya memberikan rasa bangga kepada rakyatnya namun mereka juga merasakan beban budaya yang besar serta hambatan bagi modernitas dan perubahan, terutama terkait wanita. Apalagi ditambah dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik saat itu yang malah menambah permasalahan. Itulah mengapa pada akhirnya terpilih UN Human Rights yang akhirnya juga menjadi UN Women untuk menangani persoalan ini (Khalidi 2016).

Dalam tulisan yang berjudul “*Hope for Female Scientists in Yemen*” yang ditulis oleh Maan A Bari Qasem Saleh dan diterbitkan oleh www.thelancet.com ingin menyarankan gagasannya untuk mendorong serta meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, pendidikan, sains, dan berpolitik. Dengan diberikan fasilitas untuk membantu perempuan memenuhi syarat untuk posisi kepemimpinan, pelatihan dan beasiswa yang mana ini merupakan langkah dan bentuk dukungan awal untuk para wanita agar menginspirasi generasi selanjutnya, juga dengan mengajak perempuan untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat yang menangani isu-isu politik dalam hal-hal kecil, membantu membangun keterampilan, menangani isu masyarakat seperti kekerasan, serta mempromosikan aktivitas berpolitik, aktivitas kontribusi wanita di kalangan wanita muda di Yaman. (Saleh 2019).

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori organisasi yang dikembangkan oleh Clive Archer beserta unsur-unsur pendukungnya sebagai kerangka analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Pemilihan teori tersebut dianggap relevan karena secara konseptual memiliki keterkaitan langsung dengan peran UN Women dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender di ranah global, khususnya di Yaman.

Dalam bukunya, *International Organization*, Archer mengidentifikasi bahwa organisasi internasional memiliki tiga peran utama, yang pertama, organisasi internasional memiliki peran sebagai aktor, dimana organisasi internasional mampu memengaruhi sistem internasional, organisasi tersebut memiliki kapasitas kelembagaan dan administratif untuk bertindak secara otonom, termasuk merancang dan mengimplementasikan program,-program di bidang politik, sosial, maupun kemanusiaan. Organisasi internasional bebas untuk mengambil keputusan dengan tidak adanya tekanan melalui pihak manapun, dan juga dapat melakukan interaksi di forum internasional yang memberikan rekomendasi yang mana negara lain sudah menyetujui untuk menjalankan hal-hal yang diperintahkan atau yang disarankan (Archer 2001,79).

Lebih jauh, organisasi internasional juga berfungsi sebagai instrumen kolektif; negara-negara anggota dapat memanfaatkannya untuk menyalurkan dan menjalankan kebijakan luar negeri mereka secara bersama-sama. Organisasi internasional dapat menjadikan kepentingan nasionalnya untuk diwujudkan melalui

anggota-anggotanya, itu merupakan kesepakatan dari berbagai pihak negara dengan melalui organisasi internasional sebagai alat ataupun jalan untuk mencapai kepentingan nasional tersebut (Archer 2001,68).

Peran selanjutnya adalah sebagai arena, dimana organisasi internasional menjadi tempat berlangsungnya interaksi diplomatik dan negosiasi antar aktor internasional. Organisasi internasional menyediakan wadah institusional yang memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan, perumusan kebijakan bersama, dan resolusi konflik melalui mekanisme multilateral. Tentunya disini organisasi internasional dapat menjadi sebuah wadah untuk melakukan perdebatan, atau melakukan kerja sama antar anggotanya untuk menemukan hasil dari suatu topik dan masalah yang sedang terjadi (Archer 2001,73).

Selain itu, organisasi internasional juga menjalankan sembilan fungsi utamanya yang mencakup artikulasi dan agregasi kepentingan nasional, pembentukan norma, proses rekrutmen, sosialisasi, pembuatan keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keputusan, penyediaan informasi, serta pelaksanaan.

Yang pertama adalah organisasi sebagai artikulasi agregasi kepentingan dalam hubungan internasional. Salah satu fungsi penting dari organisasi internasional adalah sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggotanya. Artikulasi kepentingan merujuk pada proses penyampaian aspirasi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing negara ke dalam forum internasional. Sementara itu, agregasi kepentingan merujuk pada

penggabungan atau pengelompokkan kepentingan negara-negara yang memiliki tujuan atas permasalahan yang serupa.

Yang kedua, organisasi internasional berfungsi sebagai pembentukan norma. Organisasi internasional berkontribusi signifikan dalam membentuk aktivitas normatif dalam sistem politik internasional. Proses pembentukan norma kini melibatkan berbagai IGOs, dan INGOs. Meskipun banyak norma yang masih lemah dan kontradiktif, organisasi internasional tetap berperan penting dalam membentuk sistem norma dan nilai dalam masyarakat internasional. Seiring meningkatnya interaksi global, norma-norma ini berkembang menjadi lebih kompleks dan berpengaruh.

Yang ketiga adalah organisasi internasional berfungsi sebagai rekrutmen. Organisasi internasional, khususnya organisasi antarpemerintah (IGO) memiliki fungsi penting dalam merekrut partisipan baru ke dalam sistem politik internasional. Karena IGO umumnya terdiri atas perwakilan negara-negara berdaulat, keanggotaan dalam organisasi ini mendorong wilayah-wilayah non-merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaannya, demi memperoleh representasi sendiri dan memperkuat universalitas keanggotaan. Sementara itu, organisasi non-pemerintah internasional (INGO) juga memainkan peran signifikan dalam merekrut partisipan baru ke dalam sistem internasional. INGO berhasil memobilisasi aktor-aktor non-negara dalam skala yang luas dan tumbuh pesat, Kehadiran mereka memperluas sistem internasional yang semula berpusat pada negara dan memperkuat struktur kerja sama antar-pemerintah yang ada.

Yang keempat adalah organisasi internasional berfungsi sebagai proses sosialisasi. Sosialisasi dalam negara-bangsa bertujuan menanamkan loyalitas individu terhadap sistem yang berlaku. Fungsi ini merujuk pada kemampuan organisasi internasional untuk membentuk dan menyebarkan norma, nilai, serta pola perilaku tertentu kepada negara-negara anggota dan aktor-aktor lainnya dalam sistem internasional. Proses ini bertujuan untuk menanamkan nilai dan norma bersama yang dapat membentuk identitas kolektif antaranggota, mendorong kebiasaan kooperatif antarnegara, seperti penyelesaian konflik melalui diplomasi, menginternalisasi standar perilaku internasional yang diharapkan ditaati oleh anggota tanpa paksaan langsung, mengembangkan loyalitas ganda, yakni loyalitas pada negara dan pada komunitas internasional melalui institusi multilateral.

Yang kelima, pembuatan keputusan. Organisasi internasional lebih terlihat dibandingkan fungsi sosialisasi. Sistem internasional tidak memiliki otoritas formal yang bersifat sentralistiki. Sebagai gantinya, aturan internasional terbentuk dari praktik-praktik masa lalu, kesepakatan bilateral, atau melalui lembaga internasional. Pembuat keputusan dalam organisasi internasional umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip konfederal, seperti konsensus hampir bulat antar anggota, hak negara untuk menarik diri, interpretasi sepihak terhadap aturan, serta lemahnya kekuasaan eksekutif organisasi dalam merumuskan kebijakan.

Yang keenam adalah organisasi internasional berfungsi sebagai pengesahan keputusan. Fungsi ini mengacu pada peran organisasi internasional dalam memberi legitimasi politik, hukum, dan moral terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh negara-negara anggota atau komunitas internasional. Organisasi internasional

menyediakan forum formal dan legal bagi negara-negara untuk merumuskan, menyetujui, dan mengesahkan kebijakan kolektif.

Yang ketujuh adalah organisasi internasional berfungsi sebagai penerapan keputusan. Fungsi ini berkaitan erat dengan pembentukan keputusan. Penerapan keputusan umumnya diserahkan kepada negara-negara berdaulat karena tidak adanya otoritas pusat global. Organisasi internasional membantu dalam penerapan keputusan yang sudah dibuat, serta memastikan keputusan tersebut berhasil diimplementasikan oleh negara-negara anggota.

Yang kedelapan adalah organisasi internasional berfungsi sebagai penyedia informasi. Organisasi internasional menyampaikan informasi secara langsung kepada individu melalui situs web, memperluas jangkauan dan meminimalkan risiko sensor. Hal ini menjadikan mereka sumber informasi yang penting, tidak hanya bagi para pembuatan kebijakan, tetapi juga bagi akademis dan masyarakat umum. Mereka juga memanfaatkan situs web dan platform digital untuk menyebarkan informasi secara langsung kepada publik, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Yang kesembilan adalah organisasi internasional berfungsi sebagai pelaksanaan. Organisasi internasional melakukan berbagai macam program dan kegiatan guna menerjemahkan keputusan atau kesepakatan internasional ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat berperan langsung sebagai pelaksana program. Fasilitator teknis atau koordinator kegiatan antarnegara.

1.7 Argumen Sementara

Dalam konteks penerapan peran organisasi internasional, pendekatan yang paling sesuai adalah memposisikan organisasi internasional sebagai aktor, karena mereka tidak hanya menjadi forum diskusi antarnegara, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertindak secara langsung melalui program, kebijakan, maupun intervensi di tingkat global maupun lokal. Karena organisasi internasional memberikan peran dalam kontribusi dan pendapat untuk para masyarakat dan organisasi internasional untuk menyelesaikan serta memberikan dampak yang positif atas apa yang dicapai dalam membantu diskriminasi di Yaman.

Dalam konteks penerapan fungsi organisasi internasional, pendekatan yang paling sesuai adalah penyedia informasi, sosialisasi, dan pelaksanaan. Karena UN Women dapat membantu Yaman mampu menjadi informan yang baik bagi para perempuan di Yaman. UN Women selaku organisasi internasional harus menjadi wadah atau yang menyediakan informasi bagi masyarakat di Yaman. UN Women juga dapat melakukan sosialisai terhadap masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan tentunya, dan masyarakat pun dapat menyerap hal-hal baik dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh UN Women.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang akan ditunjukkan melalui hasil pengumpulan data yang diperoleh dari studi literatur sehingga dapat memudahkan peneliti menyelesaikan penelitian ini serta melakukan penelitian lebih lanjut.

1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek yang dimana akan dikenai kesimpulan hasil penelitian, di dalam jenis penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai sumber informasi oleh peneliti untuk melengkapi penelitian. penelitian ini menempatkan subjek penelitiannya adalah *UN Women*.

Objek penelitian merupakan yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian yang akan dianalisis berdasarkan teori yang sesuai, objek yang dijadikan penelitian ini adalah *Diskriminasi di Yaman*.

1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan sumber sekunder yaitu melalui hasil dari artikel, berita, serta jurnal- jurnal untuk mendukung penelitian ini.

1.8.4 *Proses Penelitian*

Pada proses penelitian, peneliti melakukan rangkaian penelitian yang dimulai dari mengidentifikasi masalah untuk dijadikan bahan pembahasan dari jurnal, artikel, sumber literatur, kemudian dilanjut sampai terbentuk suatu rumusan masalah yang dilanjutkan dengan penelitian melalui pengambilan data yang kemudian dianalisis datanya. Memastikan data-data yang digunakan berkaitan dengan tema, isi, maupun sumbernya. Setelah pengumpulan data, peneliti akan mengemas penelitian dengan baik.

1.9 Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun skripsi ini secara sistematis dalam empat bab. Diawali dengan bab satu untuk memberikan gambaran awal tentang konteks dan arah penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

cakupan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sampai sistematika pembahasan. Selanjutnya adalah bab dua yang membahas teori sebelumnya secara singkat, dan dilanjut dengan pengimplementasian peran organisasi internasional UN Women dengan membentuk Women, Peace, and Security dalam memperjuangkan perempuan di Yaman. Selanjutnya pada bab tiga, peneliti menjelaskan pengimplementasian fungsi dari organisasi internasional UN Women dengan membentuk Women, Peace, and Security dalam memperjuangkan perempuan di Yaman. Diakhiri dengan bab empat yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi atau saran yang dapat diberikan bagi pihak terkait atau pada penelitian selanjutnya.

BAB 2

**PERAN UN WOMEN SEBAGAI AKTOR MELALUI AGENDA WOMEN
PEACE, AND SECURITY (WPS) DALAM MEMPERJUANGKAN
PEREMPUAN DI YAMAN**

2.1 Organisasi Internasional sebagai Aktor menurut Clive Archer

Dalam bukunya, "*International Organizations*" (2001) organisasi internasional adalah suatu bentuk dari hubungan internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari organisasi sosial. Dengan kata lain, organisasi internasional bukan aktor independent, melainkan alat yang dirancang dan digunakan oleh negara-negara untuk mencapai tujuan nasional mereka, menyelesaikan masalah bersama, dan juga meningkatkan efisiensi diplomasi atau kerjasama multilateral. Sebagai aktor, beberapa organisasi internasional memiliki kapasitas independent untuk bertindak atas nama komunitas internasional. Mereka bisa menjalankan program, memberikan bantuan, sertra mempengaruhi kebijakan internasional secara berlangsung tanpa selalu bergantung pada arahan negara anggota. Seperti yang terjadi di IGO sendiri, anggota di dalamnya pasti memiliki tujuan yang berbeda, anggota-anggota tersebut adalah negara berdaulat yang mampu memberikan batasan pada tindakan-tindakan organisasi internasional dengan tujuan tertentu sesuai kebijakan yang sudah mereka sepakati. Organisasi juga berperan penting dalam suatu kebijakan nasional negara yang dimana koordinasi multilateral akan selalu dijadikan sasaran jangka panjang bagi pemerintah nasional di suatu negara tersebut. (Archer 2001).

2.2 Profil UN Women

Sebagai bagian khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN Women didirikan pada bulan Juli tahun 2010 melalui Resolusi Majelis Umum PBB 64/289. untuk memperkuat kerja PBB dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women memainkan peran aktif dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan, perdamaian, dan hak asasi manusia, termasuk di negara-negara konflik seperti Yaman. UN Women ingin menutup kasus kesenjangan gender, serta membangun dunia yang setara bagi semua perempuan dan anak perempuan. UN Women ingin selalu menempatkan hak- hak perempuan dan anak perempuan di pusat kemajuan global dimanapun. Adapun peran yang dilakukan oleh UN Women yaitu mendukung badan- badan antarpemerintah seperti Komisi Status Perempuan dalam perumusan tentang kebijakan, standart, dan juga norma global. Kemudian juga membantu negara anggota dalam penerapan standar, serta memberikan dukungan teknis dan finansial yang memadai kepada negara yang meminta bantuannya. UN Women juga menjalin kemitraan yang bisa dibilang efektif dengan masyarakat sipil. UN Women juga memimpin dan juga mengoordinasikan kerja sistem PBB dalam kesetaraan fender, serta mendorong akuntabilitas, termasuk melalui pemantauan berkala terhadap kemajuan di seluruh sistem. (UN Women n.d.)

2.3 UN Women sebagai Aktor dalam Memperjuangkan Perempuan Yaman

Yaman mengalami konflik bersenjata yang memperburuk kondisi perempuan dan anak perempuan, seperti meningkatnya kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, serta akses terbatas terhadap layanan dasar. Sebagai bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN Women menjalankan perannya sebagai aktor, sebagaimana dijelaskan oleh Archer. Dalam konteks ini, UN Women menjadi Peranan UN Women sebagai aktor adalah ikut dalam kerjasama dengan berbagai organisasi lainnya guna mengimplementasikan mekanisme yang turut mendukung kesejahteraan bagi perempuan di Yaman, serta turut terlibat dalam upaya tersebut dengan memberikan dukungan secara psikososial bagi para perempuan yang telah dirampas haknya.

Peranan organisasi internasional sebagai aktor bagi para anggota di dalamnya bukan hanya berguna untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan di setiap anggotanya, namun jika sebuah organisasi internasional dibuat, maka anggota di dalamnya memiliki kesepakatan yang sudah dibatasi dan sudah disetujui dalam sebuah instrumental guna mengatur secara multilateral aktivitas anggota-anggota di dalam lingkup yang sudah ditentukan.

UN Women mulai beroperasi di Yaman pada 2014, tepatnya di bulan Desember. UN Women hadir sebagai bentuk respons terhadap peningkatan konflik bersenjata sejak September 2014 yang disebabkan oleh kelompok Houthi yang mengambil alih kota Sana'a. Pada tahun 2010, UN Women sudah aktif di kawasan negara-negara di Arab, namun untuk melangsungkan peran dan fungsinya, UN

Women mulai beroperasi secara formal pada Desember tahun 2014, yang dimana pada saat itu 80% populasi Yaman atau sekitar 22,2 juta orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan diantaranya adalah perempuan dan anak sebesar 70%. (UN Women 2018)

UN Women mendirikan kantor operasional dengan keterbatasannya sebagai bentuk awal bantuan yang responsif. Hal ini sejalan dengan Yemen Humanitarian Response Plan (YHRP) tahun 2014, yang dimana UN Women bekerjasama dengan Gender Based Violence Sub-Cluster guna memetakan kebutuhan perempuan. Sebagai organisasi yang mengadvokasi dan memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam perdamaian dan pembangunan. (ReliefWeb 2017)

Negara-negara anggota PBB yang mendukung pembentukan dan pendanaan UN Women untuk memastikan bahwa perspektif gender menjadi bagian integral dalam respon kemanusiaan dan proses perdamaian. Negara donor seperti Norwegia, Kanada, Swedia, menggunakan UN Women sebagai sarana menyalurkan agenda kesetaraan gender dan *Women, Peace, and Security* (WPS) ke wilayah konflik di Yaman (Jadallah 2015).

UN Women bertindak sebagai aktor dari negara-negara anggota PBB untuk mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan internasional. Di Yaman, UN Women menjalankan mandat yang diberikan oleh komunitas internasional untuk mengimplementasikan agenda *Women, Peace, and Security* (WPS), menyediakan analisis gender dalam krisis kemanusiaan, dan mengutamakan kebutuhan dan hak perempuan dalam proses perdamaian. Peran aktor ini menunjukkan bahwa UN Women adalah bagian dari mekanisme global yang dibentuk untuk merespons

tantangan gender dalam situasi konflik. UN Women juga turut membantu memudahkan pemerintah untuk membuat kebijakan. Sebagai aktor, UN Women memberikan peran penting dalam mentransformasikan agenda kesetaraan gender ke dalam kebijakan dan aksi nyata melalui pendekatan *Women, Peace, and Security* (WPS). Pendanaan dan mandat UN Women di Yaman bergantung pada negara-negara donor seperti Norwegia, Kanada, dan Swedia. Tanpa dukungan politik dan finansial dari negara-negara tersebut, organisasi ini tidak dapat berfungsi optimal. Yang mana ini menunjukkan bahwa UN Women digunakan sebagai aktor negara untuk mencapai kebijakan luar negeri atau soft power. Dengan begitu, UN Women tidak sepenuhnya independent, melainkan alat kerja sama internasional yang dijalankan sesuai dengan kepentingan negara-negara anggota PBB. Peran ini sangat penting untuk menciptakan consensus global mengenai pentingnya kesetaraan gender dan mengarahkan negara-negara untuk mengadopsi prinsip *Women, Peace, and Security* (WPS).

Peran UN Women sebagai aktor tentunya sangat diperlukan bagi negara-negara yang sedang memperjuangkan hak perempuan di negaranya untuk berdiskusi, membuat kebijakan, bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. UN Women juga menjamin bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk menjalani hidup yang seutuhnya serta terbebas dari diskriminasi. UN Women memfasilitasi diskusi tersebut, dan memastikan bahwa peran UN Women berguna untuk mempermudah serta mempercepat proses menuju tujuan di negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan setiap perempuan di Yaman. Dengan demikian, UN Women menjalankan perannya, melainkan juga memperkuat suara perempuan Yaman di ranah global (UN Women 2015b).

Peranan UN Women sebagai aktor juga turut serta dalam kerjasama dengan berbagai organisasi lainnya guna mengimplementasikan mekanisme yang turut mendukung kesejahteraan bagi perempuan di Yaman, serta turut terlibat dalam upaya tersebut dengan memberikan dukungan secara psikososial bagi para perempuan yang telah dirampas haknya. Dengan perannya sebagai aktor, organisasi internasional bukan hanya pelengkap dalam hubungan antarnegara, tetapi juga bagian penting dalam mengatur tata kelola global, karena peranan organisasi internasional memiliki peran strategis dalam system internasional kontemporer, serta dapat membantu menyelesaikan konflik, dan memperjuangkan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan (UN Women 2015a).

Hadirnya UN Women dalam penerapannya dalam membantu perempuan di Yaman tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa adanya tantangan yang dihadapi mereka, seperti konservatisme budaya dan sistem patriarki yang mengakar dikarenakan masyarakat Yaman dikenal memiliki struktur sosial yang sangat patriarkal dan konservatif secara budaya dan agama. Di mana peran perempuan masih dipandang subordinatif terhadap laki-laki. Adopsi norma internasional tentang kesetaraan gender sering dianggap sebagai bentuk intervensi barat atau bertentangan dengan agama atau adat istiadat lokal. Penerapan peran UN Women dalam mengadvokasi suatu kebijakan bersama perempuan kerap mengalami penolakan sosial atau bahkan ancaman terhadap aktivis lokal perempuan. Hal inilah yang menjadi hambatan UN Women dalam melangsungkan perannya, karena apapun yang berbau internasional tidak mudah diterima oleh komunitas lokal.

Selain dikarenakan masyarakat Yaman yang masih konservatif, Yaman juga memiliki keterbatasan kapasitas negara dan infrastruktur dikarenakan sebagian besar institusi negara di Yaman saat ini tidak berfungsi secara optimal, terutama di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata non-negara. Serta dari kurangnya pegawai pemerintah yang terlatih dalam isu gender dan HAM membuat pelaksanaan peran dan fungsi UN Women tidak berjalan optimal dan memperburuk situasi. Selain itu dari segi infrastruktur komunikasi dan pendidikan juga rusak, sehingga kampanye kesadaran normatif sulit menjangkau masyarakat luas. Ini tentunya berdampak pada sulitnya membangun kapasitas lokal dalam menyebarkan dan menegakkan norma internasional tentang kesetaraan dan perlindungan perempuan.

Dengan keterbatasan kapasitas dan infrastruktur negara yang terbatas inilah yang menyebabkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan peran UN Women semakin terhambat, yang disebabkan oleh minimnya komitmen politik terhadap isu gender. Dalam proses perdamaian dan rekonstruksi, isu perempuan seringkali dikesampingkan. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam perundingan damai, para pemimpin politik serta negosiator perdamaian mayoritas laki-laki, mereka juga sering tidak memberikan ruang pada perempuan atau perspektif gender dalam proses pengambilan keputusan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip *Women, Peace, and Security* (WPS). UN Women mendorong Resolusi PBB 1325 tentang *Women, Peace, and Security* juga sering diabaikan dalam praktik meskipun sudah sering diadvokasi oleh UN Women. Hal ini tentu berdampak dengan tidak ada kemauan politik untuk

mengintegrasikan norma-norma kesetaraan gender ke dalam proses perdamaian dan pembangunan kembali negara.

Dikarenakan kurangnya kesadaran pemerintah mengenai hal ini, maka dukungan dana dan sumber daya menjadi sangat terbatas untuk menunjang pemberdayaan perempuan di Yaman. UN Women dan organisasi mitra seringkali kekurangan pendanaan khusus untuk intervensi gender di zona konflik seperti Yaman. Sebagian besar dana bantuan kemanusiaan lebih banyak difokuskan pada kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan kesehatan. Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi prioritas pembiayaan. Sehingga hal ini jadi membatasi aktivitas UN Women dalam menyebarkan norma-norma global melalui cakupan dan intensitas. Pendanaan awal pada tahun 2014 adalah sejumlah \$2 juta, namun anggaran untuk isu gender hanya 20% dari total keseluruhan dana. Hal ini juga menyebabkan sulitnya fungsi normatif yang memerlukan investasi jangka panjang dan pendekatan struktural menjadi sulit dilakukan secara konsisten. (Oxfam International 2017)

Pemerintah Yaman mengalami perpecahan antara Houthi dan pemerintah Hadi yang akhirnya menghambat kolaborasi dikarenakan adanya fragmentasi teritorial dan kepemimpinan lokal. Yaman terbagi dalam beberapa wilayah kekuasaan yang tidak saling terkoordinasi. Sehingga tidak ada otoritas tunggal yang dapat diberi tanggung jawab untuk mengadopsi norma internasional secara menyeluruh, dan sulitnya melakukan penerapan norma internasional secara selaras. Ditambah lagi dengan perbedaan pandangan dari masing-masing wilayah mengenai pandangannya terhadap isu perempuan dan penerimaan terhadap kerja sama

internasional. Dampaknya adalah pelaksanaan peran dan fungsi UN Women menjadi terfragmentasi dan inkonsisten tergantung pada wilayah dan pihak berwenang setempat. Fragmentasi kepemimpinan dan teritorial inilah yang menyebabkan skala penerapan UN Women menjadi terbatas. Perempuan di wilayah konflik ini hanya dapat dijangkau hanya 30% di tahun 2014 hingga 2015. Pemerintah Yaman yang terpecah juga membuat kerjasama yang akan dilakukan oleh UN Women terhadap pemberdayaan wanita ini menjadi tertunda karena seluruh akses ditolak di wilayah kekuasaan Houthi, hal ini menyebabkan 40% inisiatif UN Women harus ditunda. (United Nations 2015)

2.4 Kerangka Women, Peace, and Security (WPS)

Agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) adalah sebuah agenda global yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam pencegahan konflik, proses perdamaian, perlindungan selama konflik, dan rekonstruksi pasca konflik (UN Women 2024). Agenda ini pertama kali diakui secara resmi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 pada tahun 2000. Agenda WPS lahir dari kesadaran bahwa perempuan sering menjadi korban utama konflik bersenjata, melalui kekerasan seksual, pengungsian, dan lain-lain (Voice of America 2012). Namun seringkali dikecualikan dari proses formal dalam penyelesaian konflik, negosiasi perdamaian, dan rekonstruksi. WPS ingin mewujudkan perdamaian yang inklusif, berkelanjutan, dan adil gender dengan menjadikan perempuan sebagai bagian penting dalam seluruh proses perdamaian dan keamanan. WPS juga memperluas perspektif keamanan dari yang semula berfokus pada militeristik menjadi keamanan manusia (*human security*) yang mencakup perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan. Organisasi seperti UN

Women berperan penting dalam menjadikan WPS bukan sekadar norma internasional, melainkan sebagai agenda nyata dalam praktik pembangunan perdamaian di Yaman (United Nations Security Council 2000).

Dalam kerangka *Women, Peace, and Security* (WPS) ini mendukung UN Women menjalankan peran langsung melalui empat pilar utama, yaitu yang pertama adalah perlindungan (*protection*). Sebagai aktor, UN Women secara langsung memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender (KBG) yang meningkat selama konflik. UN Women mengembangkan modul pelatihan bagi petugas keamanan local dan mitra kemanusiaan untuk memahami dan menangani kasus KBG secara sensitif. UN Women juga memberi dukungan penuh untuk system rujukan nasional bagi korban kekerasan agar mereka tidak terabaikan dalam proses darurat (Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) 2020).

Yang kedua adalah partisipasi (*participation*). UN Women bertindak sebagai aktor untuk mendorong keterlibatan aktif perempuan Yaman dalam seluruh proses pengambilan keputusan politik dan juga perundingan damai. UN Women juga mendorong penerapan kuota keterwakilan perempuan dalam badan transisi politik melalui advokasi ke aktor internasional dan PBB (Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) 2020).

Pilar yang ketiga adalah pencegahan konflik (*prevention*). UN Women berperan dalam memperkuat kapasitas perempuan untuk mendeteksi dini potensi konflik dan mencegah eskalasi kekerasan. UN Women memberikan pelatihan komunitas sebagai mediator lokal untuk menyelesaikan konflik antar kelompok,

termasuk di wilayah rentan seperti Al Hudaydah dan Taiz. UN Women juga turut memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan Early Warning System berbasis komunitas dengan melibatkan perempuan dalam pelaporan tanda-tanda radikalisasi atau kekerasan (Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) 2020).

Pilar yang terakhir, yaitu pemulihan dan reintegrasi (*relief and recovery*). UN Women memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi untuk bangkit dari dampak perang dan mengisi kembali peran dalam pembangunan komunitas. UN Women melaksanakan program *Cash For Work* dan pelatihan keterampilan untuk janda, perempuan kepala keluarga, dan penyintas konflik. UN Women juga memberikan dukungan pembentukan koperasi perempuan dan usaha kecil mikro di bidang menjahit, kuliner, dan pertanian. UN Women juga memberikan bantuan peralatan dan pelatihan berbasis komunitas berbasis seperti klinik ibu dan anak, pusat literasi dan sekolah informal (Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) 2020).

2.5 Analisis Fungsi UN Women dalam Memperjuangkan Perempuan di Yaman

Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* (2001) mengemukakan bahwa organisasi internasional memiliki peran dan fungsi penting dalam tatanan dunia modern, terutama dalam menangani isu-isu lintas negara. Menurut Archer, organisasi internasional menjalankan sembilan fungsi pokok, yakni mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan negara anggota, membentuk norma, merekrut aktor, melakukan sosialisasi, merumuskan keputusan,

mengesahkan keputusan, mengimplementasikan keputusan, menyediakan informasi, dan melaksanakan program. (Archer 2001)

Berdasarkan analisis terhadap aktivitas dan mandat UN Women, terdapat tiga fungsi yang paling relevan, yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan penyedia informasi. Ketiga fungsi ini menggambarkan bagaimana UN Women tidak hanya berkontribusi dalam mengembangkan kerangka normatif global terkait kesetaraan gender, tetapi juga menerapkan dan menyosialisasikan nilai-nilai tersebut secara konkret di negara-negara konflik, termasuk Yaman.

Dalam fungsi sosialisasi, organisasi internasional UN Women menyebarluarkan serta memberikan sosialisasi tentang norma dan nilai melalui pelatihan, kampanye, dialog untuk mengubah perilaku negara, masyarakat, maupun individu agar bisa setara dengan standar yang ditetapkan oleh norma internasional. UN Women juga menyelenggarakan pelatihan kesetaraan gender, seperti yang sudah dilakukan oleh UN Women yang memberikan pelatihan kepemimpinan yang menjangkau 500 ribu perempuan di 45 negara. Program-program UN Women tentang kepemimpinan dan partisipasi juga berpedoman pada sejarah komitmen di ranah internasional terhadap representasi perempuan. Perjanjian penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan juga dijunjung tinggi dalam kampanye yang dilakukan oleh UN Women. (UN Women 2022).

UN Women juga menjalankan fungsinya sebagai pelaksanaan yang tentunya mencakup aksi nyata yang dilakukan oleh UN Women melalui program kemanusiaan, dan pelatihan. Salah satu program UN Women adalah program pemberdayaan ekonomi untuk 1,5 juta perempuan di 50 negara bagi perempuan

yang terdampak kemiskinan, diskriminasi, dan eksploitasi secara tidak proporsional. UN women menyediakan bantuan program untuk mendorong perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak, UN Women menjangkau perempuan yang paling membutuhkan, dan tidak jarang mereka melibatkan masyarakat sipil seperti perempuan yang memiliki keterampilan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, akses, serta kendali yang lebih baik, dan dapat terhindar dari kekerasan. Fungsi pelaksanaan merupakan fungsi yang paling efektif karena UN Women turun langsung untuk melaksanakan programnya, dan berkoordinasi langsung dengan masyarakat lokal. (UN Women n.d.)

Fungsi selanjutnya adalah UN Women sebagai penyediaan informasi, fungsi ini memberikan penyebaran data, pengumpulan data untuk mendukung kebijakan UN Women tentang kesetaraan gender. Fungsi penyediaan informasi juga turut menjalankan fungsinya sebagai pengaruh opini publik, dan dapat meningkatkan transparansi. UN Women telah menerbitkan laporan seperti *Progress of the World's Women* yang digunakan untuk merancang kebijakan gender oleh 80 negara. UN Women juga menerbitkan laporan tentang kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang berpengaruh untuk 45 negara, dan hal itu dapat memperkuat undang-undang anti kekerasan setelah 70% negara melaporkan meningkatnya pelaporan tentang KBG setelah diterbitkannya laporan tersebut. (UN Women 2022)

BAB 3

FUNGSI ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PENERAPAN FUNGSI NYA OLEH UN WOMEN MELALUI AGENDA WOMEN, PEACE, AND SECURITY DI YAMAN

3.1 UN Women melalui Agenda WPS sebagai Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi merujuk pada Upaya organisasi internasional untuk menyebarkan nilai dan norma global kepada aktor-aktor lokal atau nasional agar mereka menginternalisasi nilai tersebut sebagai bagian dari praktik kebijakan dan sosial mereka. UN Women melakukan sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender dan inklusi perempuan melalui berbagai pelatihan, lokakarya, dan kampanye publik di Yaman. Organisasi ini berupaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian, serta mengubah pandangan tradisional yang cenderung mengecualikan perempuan dari ranah politik dan keamanan.

UN Women mempromosikan nilai kesetaraan gender kepada aktor-aktor lain seperti LSM, pemerintah, dan badan PBB. Fungsi ini merujuk pada proses di mana organisasi internasional menyebarkan nilai-nilai dan norma internasional kepada aktor-aktor domestic atau internasional lainnya. UN Women sebagai agen normatif yang menyosialisasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender kepada para pemangku kepentingan, dengan harapan nilai-nilai tersebut diinternalisasi dan diimplementasikan dalam kebijakan dan program tanggap bencana secara berkelanjutan.

UN Women memberikan masukan substansif tentang gencatan senjata, pertukaran tahanan, akses kemanusiaan, dan perlindungan kelompok rentan. Dalam pertemuan-pertemuan teknis dan forum internasional, UN Women menyuarakan kebutuhan perempuan di Yaman, termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual selama perang, jaminan pendidikan dan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak perempuan, keterwakilan perempuan dalam badan transisi pascakonflik.

Agenda WPS menjalankan fungsi sosialisasi dibantu oleh Yemeni Women's Pact for Peace and Security (YWPPS) pada penyampaian pesan dari luar dengan cara bekerja untuk membangun kesadaran kolektif baru di tengah masyarakat yang terfragmentasi. Sosialisasi di sini tidak bersifat pasif dan satu arah, melainkan bersifat interaktif, kontekstual, dan bertahap menyesuaikan dengan struktur sosial yang syarat nilai konservatif dari kontrol budaya terhadap perempuan. WPS menjalankan sosialisasi bukan lewat terminologi formal, melainkan melalui pendekatan- pendekatan berbasis komunitas, dengan cara melakukan kampanye naratif yang membingkai perempuan bukan hanya sebagai beban dalam konflik, tetapi sebagai penentu keberlanjutan perdamaian. WPS bersama dengan YWPPS membingkai ulang peran dan citra perempuan dalam imajinasi publik.

Proses sosialisasi ini menjurus ke struktur kuasa, para negosiator laki- laki, pejabat lokal, dan institusi keagamaan agar membuka ruang partisipasi perempuan. Jadi, WPS bukan hanya membangun penerimaan normatif, melainkan membantu untuk mendorong perubahan persepsi dan legitimasi sosial terhadap gagasan kesetaraan gender di ruang publik. WPS juga memberikan kekuatan, dan

menyosialisasikan YWPPS untuk mengubah norma melalui kebiasaan dan pengulangan nilai dalam praktik keseharian di tengah polarisasi politik dan militerisasi kehidupan sipil di Yaman, bukan hanya sekadar melalui regulasi saja. Contohnya ketika perempuan di Yaman mulai hadir dalam pertemuan desa, duduk dalam forum damai lokal, dan berbicara atas nama komunitas, maka norma kesetaraan yang WPS dan YWPPS sosialisasikan dapat bertransformasi dari abstraksi menjadi kenyataan sosial. WPS bekerja sebagai strategi perubahan budaya yang perlahan, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Sosialisasi bukan hanya alat penyebaran nilai, tetap menjadi senjata politik lembut (*soft resistance*) yang mengikis dominasi nilai patriarkal dengan cara yang tidak konfrontatif, tetapi tetap transformatif.

UN Women menyelenggarakan pelatihan bagi perempuan di Sana'a, Aden, dengan bekerja sama dengan Yemeni Women's Union, untuk meningkatkan kesadaran tentang hak politik, ekonomi, dan perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) pada tahun 2015-2017. UN Women telah menjangkau lebih dari 3000 perempuan, dengan 25% atau sekitar 750 orang yang aktif dalam forum perdamaian lokal di tahun 2017. Pelatihan ini dapat mencaoai kesepakatan bersama dengan WPS untuk melatih keterampilan kepemimpinan. UN Women juga menyosialisasikan kampanye Anti Pernikahan Dini dan KBG, bekerja sama dengan UNICEF, UN Women melangsungkan kampanye tersebut di Sana'a dan Hodeida, dan berhasil mendatangkan 10.000 keluarga, serta mampu mengurangi 5% kasus pernikahan dini. (UN Women 2023)

3.2 UN Women melalui Agenda WPS sebagai Fungsi Pelaksanaan

Sebagai organisasi internasional yang juga memiliki kapabilitas teknis dan programatik, UN Women tidak hanya membentuk norma, tetapi juga terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program di lapangan untuk menerjemahkan norma, kesepakatan, dan kebijakan. Dalam konteks Yaman, UN Women melaksanakan program pemberdayaan perempuan korban konflik, membangun kapasitas organisasi masyarakat sipil perempuan, serta memfasilitasi partisipasi perempuan dalam proses negosiasi perdamaian, termasuk dalam dialog informal. Melalui program-program ini, UN Women menunjukkan dirinya sebagai aktor pelaksana yang menjembatani antara prinsip internasional dan kebutuhan lokal dengan menjadi aksi nyata di lapangan. UN Women mengikuti pelaksanaan Tanggap Kemanusiaan (Humanitarian Action) yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan yang terdampak konflik mendapatkan akses terhadap perlindungan, partisipasi, dan pemberdayaan dalam proses pemulihan pasca konflik. Aktivitas ini menunjukkan manifestasi dari fungsi pelaksanaan dalam organisasi internasional, organisasi internasional tidak hanya berperan dalam pembentukan norma atau advokasi, tetapi juga melakukan intervensi langsung melalui program kemanusiaan. UN Women melaksanakan program nyata di lapangan untuk menjawab kebutuhan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak perempuan dalam situasi krisis. UN Women juga turut menjadi aktor langsung dalam intervensi kemanusiaan (UN Women, n.d.).

Women, Peace, and Security (WPS) melaksanakan agenda kolektif perempuan untuk perdamaian. WPS menjadi alat pelaksanaan di Resolusi DK PBB 1325 di tingkat nasional yang diwujudkan melalui keterlibatan perempuan dalam pemantauan pelanggaran HAM selama konflik, memperkuat peran perempuan dalam gencatan senjata dan dialog politik, serta membentuk konstitusi dan rekonsiliasi pasca-konflik. WPS juga mengisi kekosongan lembaga pemerintah dan perlindungan perempuan dengan memonitor keterlibatan perempuan dalam forum perdamaian lokal dan mencatat pelanggaran berbasis gender (UN Women 2022).

Women, peace, and Security dibantu oleh YWPPS memberikan kepastian keterlibatannya untuk mengeksekusi mandat dari PBB. Tidak hanya itu, WPS juga memodifikasi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Dalam ketiadaan sistem legal formal yang responsif terhadap perempuan, WPS dibantu oleh YWPPS menciptakan sistem informal sebagai alternatif untuk perlindungan dan representasi perempuan, serta memperkuat persatuan sosial perempuan di luar struktur negara (Peace Track Initiative 2021).

WPS bisa dibilang berhasil dalam membentuk koalisi perempuan lintas kubu politik dan sektarian juga merupakan bentuk konkret fungsi pelaksanaan. Dalam situasi di mana elite laki-laki kerap gagal mencapai kesepakatan damai, WPS mewujudkan praktik koeksistensi lintas batas melalui komunikasi, negosiasi informal, dan pembangunan kepercayaan sosial antarkomunitas. Ini menegaskan bahwa pelaksanaan tidak selalu hadir dari kekuasaan vertikal, tetapi bisa muncul dari solidaritas horizontal. Fungsi pelaksanaan oleh WPS bekerja bukan dengan “memerintah” tetapi dengan memungkinkan, yang dimaksud memungkinkan

dalah memungkinkan perempuan untuk bertindak, komunitas untuk bertransformasi, dan nilai-nilai global untuk hidup dalam realitas lokal yang kompleks.

Adapun pengimplementasian yang dilakukan UN Women melalui agenda Women, Peace, and Security (WPS). Yang pertama adalah Advokasi keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian formal. Agenda WPS menempatkan partisipasi perempuan sebagai elemen kunci dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek dari kebijakan perdamaian, tetapi juga menjadi aktor aktif dalam negosiasi, perjanjian damai, dan proses rekonsiliasi nasional. Mereka mendorong kuota keterwakilan perempuan dalam tim negosiator konflik, melakukan pelatihan perempuan lokal dalam diplomasi dan mediasi, serta memfasilitasi forum nasional dan regional bagi perempuan pemimpin aktivis. UN Women mendukung pembentukan *Yemeni Women's Pact for Peace and Security* untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembicaraan damai, yang sebelumnya 0% di tahun 2014-2015, berkembang menjadi 4% pada tahun 2016 setelah dibentuknya YWPPS. UN Women ingin memastikan bahwa suara perempuan hadir dalam meja perundingan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Melalui kelompok ini, UN Women memperkuat kapasitas perempuan dalam forum-forum formal negosiasi. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan WPS sebagai aktor dalam memperluas ruang politik bagi perempuan di tingkat nasional maupun lokal.

Yang kedua yaitu perlindungan perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) selama konflik. Konflik bersenjata secara signifikan meningkatkan risiko

terjadi. Hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari risiko kekerasan, terutama kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat drastis selama konflik. Mereka menyediakan layanan darurat seperti tempat aman (*safe houses*), layanan konseling, pemberian bantuan medis dan bantuan hukum, serta memberikan edukasi mengenai hak-hak perempuan dan mekanisme pelaporan. Mereka juga meningkatkan kapasitas lembaga lokal untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender, dan juga melakukan kampanye penyadaran untuk menolak kekerasan terhadap perempuan. Program ini diterapkan untuk mengimplementasikan agenda WPS menjadi aksi yang nyata, termasuk perlindungan, pelatihan livelihoods, dan dukungan childcare. Contohnya adalah, UN Women bekerja sama dengan Yemeni Women's Union (YWU) untuk mendirikan safe shelters yang menawarkan layanan legal, sosial, dan ekonomi bagi korban KBG. Fokus mereka adalah ke wilayah konflik seperti Sana'a dan Aden. Hal ini menegaskan bahwa UN Women sebagai aktor menjalankan perannya dalam memastikan perlindungan bagi kelompok rentan, sejalan dengan prinsip WPS (Human Rights Watch 2023).

Sebelum adanya UN Women, perempuan di Yaman melaporkan kasus KBG sebanyak 55%, namun hanya 40% yang mendapat dukungan dari layanan, seperti layanan UNIFEM di tahun 2009. Perempuan mengalami kekerasan fisik seumur hidup, namun rendahnya pelaporan disana menyebabkan kasus tersebut tidak ditangani dengan baik dikarenakan norma patriarkal yang ada. Dengan datangnya UN Women, UN Women melaksanakan program fase houses yang melindungi 1500+ perempuan, UN Women mendukung Yemeni Women's Union

untuk mendirikan safe shelters, memberikan legal support seperti bimbingan konseling bagi pada korban KBG yang melaporkan. (UN Women n.d.)

Selanjutnya adalah melaksanakan pemberdayaan perempuan dalam proses rekonstruksi sosial dan ekonomi pascakonflik. Pascakonflik, perempuan sering kali menghadapi beban ganda sebagai pengasuh keluarga dan pencari nafkah, terutama jika mereka kehilangan pasangan atau tempat tinggal. Oleh karena itu agenda WPS menekankan pentingnya pemulihan dan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian dari rekonstruksi yang inklusif. UN Women mengimplementasikan berbagai program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan yang terdampak konflik di Yaman. UN Women melaksanakan program Cash for Work yang memberikan dukungan penuh bagi 2000 perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi 1000 perempuan di Sana'a, Aden, dan Hodeida. Tentunya hal ini juga bertujuan untuk memberikan perempuan peran dalam pembangunan kembali masyarakat, ekonomi, dan institusi pascakonflik, serta mengurangi ketergantungan mereka secara ekonomi. Cash for Work merupakan program inisiatif kemanusiaan yang memberikan kompensasi finansial kepada individu maupun kelompok, untuk memberikan pendapatan jangka pendek, serta mendukung pemulihan komunitas, dan mengurangi kemiskinan. (Sana'a Center for Strategic Studies 2019)

Melalui program Cash for Work, perempuan di Yaman diberikan kesempatan untuk membantu bekerja, seperti membersihkan puing-puing, melakukan perbaikan saluran air, dan ikut memperbaiki infrastruktur ringan lainnya, serta membuat produk kerajinan tangan yang dijual di pasar lokal. Cash for

Work mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di Yaman dengan UN Women, serta Yemeni Women's Pact for Peace and Security melakukan partisipasi angkatan kerja yang melibatkan perempuan, hingga menjadi 6,08% di tahun 2017, yang sebelumnya 6,96% di tahun 2013. Mereka membentuk program pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan bagi perempuan, memberikan penguatan kapasitas organisasi perempuan lokal, dan juga memberikan dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan komunitas. UN Women menyelenggarakan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, pertanian mikro seperti menanam lobak, okra, dan zucchini. Mereka juga membantu pengelolaan keuangan bagi para perempuan yang kehilangan mata pencaharian akibat perang, serta memberikan program literasi keuangan dan kewirausahaan. Di wilayah seperti Aden dan Sana'a, program ini tentunya bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi di tengah situasi kemiskinan dan pengungsian, serta agar mereka mampu bangkit dari krisis dan berkontribusi pada pemulihan sosial masyarakat. Hal ini memperlihatkan implementasi nyata dari prinsip *relief and reintegration* dalam agenda WPS. (UN Women 2018).

UN Women juga melaksanakan kegiatan guna penguatan organisasi masyarakat sipil perempuan dalam melakukan advokasi lokal. Agenda WPS tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipil perempuan. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam penyampaian layanan, advokasi kebijakan, serta menyuarakan aspirasi perempuan di tingkat komunitas. Mereka juga memberikan hibah dan bantuan teknis untuk LSM perempuan lokal, memberikan pelatihan manajemen proyek, advokasi, dan pemantauan HAM, mereka juga menguatkan

partisipasinya dalam proses pengambilan kebijakan. UN Women mendanai beberapa organisasi lokal perempuan untuk menjalankan proyek advokasi hak perempuan, dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia, serta kampanye damai berbasis komunitas. Dengan memperkuat organisasi akar rumput. WPS sebagai instrumen internasional turut memperluas ruang partisipasi sipil dan memperkuat demokrasi partisipatif dalam konteks pascakonflik. (UN Women 2018a)

3.3 UN Women melalui Agenda WPS sebagai Fungsi Penyediaan Informasi

Fungsi ini berkaitan dengan kontribusi organisasi internasional dalam menghasilkan, menyebarkan, dan memfasilitasi akses terhadap data dan pengetahuan. UN Women aktif dalam mendokumentasikan dampak konflik terhadap perempuan di Yaman serta menyediakan data berbasis gender yang sering kali diabaikan dalam laporan konflik konvensional. Melalui laporan tahunan, publikasi tematik, dan studi lapangan, UN Women berupaya mendorong kebijakan berbasis bukti yang inklusif dan responsive terhadap pengalaman perempuan. Fungsi ini menjadi kunci dalam mendukung fungsi lainnya, karena informasi yang akurat menjadi dasar dalam penyusunan norma dan pelaksanaan program.

UN Women turut berperan dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesadaran para mitra lokal maupun internasional. Fungsi ini penting karena informasi yang disediakan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan penyusunan strategi program kemanusiaan yang lebih inklusif dan responsive terhadap kebutuhan perempuan.

Akses terhadap informasi akurat, terpercaya, dan inklusif menjadi barang langka, terutama bagi perempuan. Banyak informasi yang beredar tidak mencerminkan pengalaman perempuan sebagai korban, penyintas, dan agen perubahan. Melalui fungsi informasi ini, WPS menjadi sangat penting dan dibutuhkan, bukan sekedar menyebarluaskan data, tetapi menciptakan ruang narasi alternatif yang merepresentasikan suara perempuan (Peace Track Initiative 2021).

Women, Peace, and Security menghadirkan narasi alternatif bahwa perempuan dapat dan harus terlibat dalam segala proses rekonsiliasi dan politik. WPS juga menyebarkan melalui media lokal, pernyataan publik. Lebih dari itu, WPS yang dibantu oleh YWPPS berfungsi sebagai perantara informasi dua arah. Di satu sisi, mereka menyampaikan informasi global seperti agenda WPS kepada komunitas perempuan di wilayah konflik dengan bahasa yang mudah diakses. WPS memperlihatkan bahwa informasi bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi juga alat politik untuk mengklaim ruang representasi (Saferworld 2022).

Penyediaan informasi yang dilakukan WPS juga menentang struktur informasi dominan yang selama ini didominasi oleh elit laki-laki dan negara. Dengan menyuarakan perspektif perempuan dari kota-kota kecil di Yaman yang terpinggirkan. WPS juga mengoreksi bias informasi yang sering terjadi dalam proses rekonstruksi pascakonflik dan desain kebijakan internasional (Oxfam and UN Women 2021).

UN Women menggunakan data, laporan, testimoni, dan hasil kajian untuk menunjukkan secara konkret bagaimana konflik bersenjata di Yaman berdampak sangat besar terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk dalam bentuk

kekerasan berbasis gender, diskriminasi struktural, dan pengucilan dari proses perdamaian. Informasi ini disebarluaskan tidak hanya kepada aktor lokal seperti masyarakat sipil dan pemerintah Yaman, tetapi juga kepada komunitas internasional, negara donor, dan lembaga PBB lainnya.

Fungsi penyediaan informasi menggambarkan tindakan konkret yang dilakukan UN Women dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Ketiga fungsi tersebut secara sinergis memperlihatkan fungsi UN Women sebagai organisasi internasional yang aktif, normatif, dan operasional menghadapi tantangan kompleks di tengah konflik bersenjata. Fungsi penyediaan informasi UN Women di Yaman ditunjukkan dengan melalui Gender in Humanitarian Action Profile (2016), serta melalui Rapid Gender Assessment tahun 2015-2016 di Sana'a, dan Aden, dan juga di Hodeida, pemetaan Yemeni Women's Pact for Peace and Security, dan juga kampanye KBG di tiga wilayah tersebut. Pemetaan tersebut melibatkan 68 pemimpin perempuan, meningkatkan partisipasi damai dari 0% pada tahun 2014 naik menjadi 4% di tahun 2016. Kampanye menjangkau 15.000 keluarga melalui 20 siaran radio Al-Yemen untuk 180 sesi. (UN Women 2023)

BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

UN Women, melalui kerangka Women, Peace, and Security (WPS) telah menjalankan perannya sebagai aktor internasional dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Yaman yang mengalami dampak berat dari konflik berkepanjangan. Melalui inisiatif Women, Peace, and Security, UN Women mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses perdamaian serta memperkuat kapasitas mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ketimpangan gender yang struktural dan budaya patriarkal yang kuat di Yaman, UN Women berperan sebagai agen normatif yang memperluas nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam ruang perdamaian dan keamanan. Melalui pendekatan advokasi, pelatihan, dan mobilisasi jaringan perempuan, UN Women menjadikan perempuan sebagai bagian dari solusi konflik, bukan sekadar korban.

Agenda WPS menjadi sebuah pembangun perdamaian inklusif yang memperhitungkan kebutuhan dan suara perempuan. Peran ini menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat menjadi penggerak perubahan dalam situasi krisis, terutama dalam mengangkat dan memperjuangkan hak kelompok rentan seperti perempuan. UN Women melalui agenda WPS hadir sebagai aktor internasional yang berupaya membentuk ruang bagi perempuan untuk turut berperan dalam proses transformasi sosial dan perdamaian.

UN Women menjalankan fungsi sosialisasinya melalui agenda WPS tidak hanya memperkuat kapasitas perempuan lokal sebagai agen perubahan, tetapi juga menginternalisasikan norma-norma internasional terkait hak perempuan ke dalam struktur masyarakat Yaman. Berbagai pelatihan hak perempuan ke dalam struktur masyarakat Yaman, berbagai pelatihan, dialog antar aktor, kampanye kesadaran publik, serta advokasi berbasis komunitas telah menjadi hal penting dalam proses sosialisasi ini. UN Women dan WPS telah aktif menjalankan fungsi sosialisasi sebagaimana dijelaskan oleh Clive Archer yang berfungsi penting dalam menciptakan ruang sosial-politik baru yang lebih terbuka terhadap keterlibatan perempuan sebagai aktor kunci dalam membangun masa depan negara.

UN Women melalui agenda WPS juga telah menjalankan fungsinya sebagai pelaksana dalam memperjuangkan perempuan di Yaman. Dalam hal ini UN Women melalui WPS juga turut memfasilitasi pelatihan kepemimpinan, sebagai pelaksana langsung di berbagai kegiatan yang mendorong pemberdayaan perempuan di tengah situasi konflik. Dalam pelaksanaan ini, UN Women mencerminkan pendekatan praktis dari agenda WPS yang memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses, ruang, dan kapasitas untuk benar-benar terlibat dalam proses tersebut. Fungsi pelaksanaan ini tidak semata administratif, tetapi strategis dalam membentuk dinamika sosial politik yang lebih inklusif di Yaman.

UN Women menjalankan fungsinya bersama dengan agenda UN Women dalam memberikan serta menyediakan informasi yang berfokus pada situasi perempuan dalam konteks konflik di Yaman. UN Women mengumpulkan dan mendiseminasikan informasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender,

hambatan partisipasi perempuan di yaman dalam proses perdamaian, serta kebutuhan spesifik dalam situasi krisis pada saat perang bersenjata. Melalui fungsi penyediaan informasi ini tentunya menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan yang responsif gender oleh berbagai aktor, baik nasional maupun internasional.

Aktivitas UN Women, termasuk penerapan fungsi sosialisasi, fungsi pelaksanaan, serta fungsi penyediaan informasi yang dilakukan oleh UN Women, menjadi sangat terbatas karena risiko keamanan dan akses yang terhambat, baik dari segi mobilitas, akses, maupun keberlanjutan program. Sehingga fungsi sosialisasi UN Women untuk menunjang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan tidak menjadi prioritas dalam konteks negara yang sedang fokus pada kelangsungan kekuasaan dan perang.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai peran dan fungsi UN Women memperjuangkan perempuan di Yaman melalui agenda Women, Peace, and Security, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar lebih mengembangkan studi lanjutan tentang inisiatif perempuan lokal dalam konflik ini karena minimnya literatur tentang WPS dalam memperjuangkan perempuan di Yaman. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih empiris untuk mendokumentasikan proses, tantangan, dan keberhasilan aliansi ini dalam membentuk agenda perdamaian. Meski studi akademik tentang WPS dalam membantu memperjuangkan perempuan di Yaman masih terbatas, hal ini justru membuka ruang bagi penelitian ini untuk menjadi salah satu kontribusi awal dalam menyoroti peran konkrit UN Women dalam konflik lokal melalui inisiatif yang

bersifat bottom-up dan berbasis lokal. Perlu adanya penelitian lanjutan yang menelaah secara rinci tentang inisiatif Yemeni Women's Pact for Peace and Security (YWPPS) sebagai model untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam resolusi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, Clive. 2001. *International Organizations*. Latest edi. London and New York: Routledge.
- Colburn, Marta. 2002. *The Republic of Yemen: Development Challenges in the 21st Century*. London: Catholic Institute for International Relations.
- Elayah, Moosa, Lau Schulpen, and Luuk van Kempen. 2022. "Peacebuilding in Yemen: Local Dynamics and the Role of International Actors." *Third World Quarterly* 43 (2): 405–24. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1962486>.
- European Commission, and European External Action Service. 2023. "Gender Action Plan III – Country Level Implementation Plan (CLIP) Yemen (Mid-Term Update)."
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52 (4): 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>.
- for Strategic Studies, Sana'a Center. 2021. "The Pact Transformed Women's Voices from Informal Consultations to Structured Inputs in Peace Negotiations." <https://sanaacenter.org/publications/main-publications/19400>.
- Human Rights Watch. 2023. "World Report 2023: Yemen." <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/yemen>.
- Jadallah, A. 2015. "Analisis Konflik Republik Yaman Untuk United Nations Country Team."
- Khalidi, Lamyā. 2016. "The Destruction of Yemen and Its Cultural Heritage." *Journal of Arabian Studies* 6 (2): 195–99. <https://doi.org/10.1080/21534764.2016.1261459>.
- Lackner, Helen. 1986. *PDR Yemen: Outpost of Socialist Development in Arabia*. London: Ithaca Press.
- OSESGY. 2018. "Strategic Report on Gender and Peacebuilding in Yemen." <https://osesgy.unmissions.org/women-peace-and-security>.
- . 2025. "Women, Peace and Security."
- Oxfam, and UN Women. 2021. "Listening to Women: Data for Gender-Responsive Peacebuilding in Yemen." <https://www.oxfam.org>.
- Paffenholz, Thania. 2016. "Making Women Count - Not Just Counting Women: Assessing Women's Inclusion and Influence on Peace Negotiations." <https://www.inclusivepeace.org/publications/making-women-count-not-just->

counting-women.

Peace Track Initiative. 2021. "Women's Peacebuilding Efforts in Yemen: Documentation of Grassroots Mobilization." <https://www.peacetrack.org>.

Saferworld. 2022. "Breaking the Silence: Women's Data Collection for Peace in Yemen." <https://www.saferworld.org.uk>.

Saleh, Maan A Bari Qasem. 2019. "Hope for Female Scientists in Yemen." *Nature Middle East*.

Sana'a Center for Strategic Studies. 2023. "Women's Voices in Yemen's Peace Process: Priorities, Recommendations, and Mechanisms for Effective Inclusion." Amman.

UN Women. n.d. "Yemen Country Page." Accessed July 31, 2025. <https://arabstates.unwomen.org/en/countries/yemen>.

———. 2015a. *Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325*. New York: UN Women.

———. 2015b. "Rapid Gender Analysis: Women and Girls in Yemen."

———. 2017. "Annual Report 2017."

———. 2018a. "Yemen Case Study." <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/10/yemen-case-study>.

———. 2018b. "Yemeni Women's Pact for Peace and Security: A Pathway for Inclusion in Peace Processes." <https://arabstates.unwomen.org/en/countries/yemen>.

———. 2022. "UN Women in Yemen: Annual Results Report." <https://www.unwomen.org>.

———. 2024. "Women, Peace and Security Country Brief: Indonesia." https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2024-01/bahasaidn_wps_country_brief_indonesia.pdf.

United Nations. 2007. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)." <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.

United Nations Security Council. 2000. "Resolution 1325 on Women, Peace and Security."

Voice of America. 2012. "Keadaan Perempuan Yaman Memburuk Pasca Revolusi." <https://www.voaindonesia.com/a/keadaan-perempuan-yaman-memburuk-pasca-revolusi/1513541.html>.

Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). 2020. "Women, Peace and Security in Yemen: Challenges and Opportunities." <https://www.wilpf.org>.

Zakham, Fathiah. 2017. "Supporting Female Scientists in Yemen." *Science* 357 (6346): 1324. <https://doi.org/10.1126/science.aao4804>.

Zyck, Steven A. 2012. "Mediating Transition in Yemen: Achievements and Lessons." *Stability: International Journal of Security & Development* 1 (1): 28. <https://doi.org/10.5334/sta.ah>.